

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH,
IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SELUMA**

*The Effect of Implementation Government Accounting Standards, Regional
Management Information Systems, and Government Internal Control Systems on
The Quality of Financial Statements at The Regional Government of Seluma*

Tri Ikyarti¹⁾, Nila Aprila²⁾

Universitas Bengkulu, Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Bengkulu

ABSTRACT

The effect of implementation of government accounting standards, regional management information systems, and government internal control systems on the quality of financial statements at the regional government of seluma district. This research used a quantitative approach, using primary data through questionnaires. Respondents of this research were 26 OPD of part of a financial manager a the regional government of seluma district. The Variables in this research is the government accounting standards, implementation of regional management information systems, and govnrment internal contcl systems as independent variables, as well the quality of local governmnt financiial statements as the dependent variable. The data were analyzed with multiple regression method. The results of hypothesis shown that the government accounting standards, implementation of regional management information systems, and government internal control systems give the impact add it was positive to the quality of financial statemnts at the regional government of seluma district.

Key words: *Government Accounting Standard, Management Information Systems, Government internal Control System and quality financial reporting government*

ABSTRAK

Pengaruh penerapan standar akuntansi pemeintah, sistem informssi manajemen daerah, dan sisitem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten seluma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Penelitian ini respondennya yaitu bagian pengelola keungan dari 26 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Seluma Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah standar akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemn daerah , dan sistem pengendalian intrnal pemerintah sebagai variabel independen, serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu menggunakan statistik analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Seluma

Kata Kunci : *Standar Akuntansi pemerintah, Sistem informasi manajemen daerah, system pengendalian internal pemerintah dan mutu laporan keuangan pemerinatah*

Corresponding author: Tri Ikyarti

Email addresses for corresponding author: triikyarti96@gmail.com , nilaaprila@gmail.com

First submission received: 19 Maret 2019

Revised submission received: 14 September 2019

Accepted: 23 September 2019

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memberikan laporan keuangan wajib disajikan dengan berkualitas, begitu banyak yang masih mengandalkan suatu informasi laporan keuangan yang di publikasikan oleh pemerintahan daerah dengan kepentingan yang berbeda. Menurut PP No 71 Tahun 2010 yang menggunakan laporan keuangan pemerintahan yaitu: masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, mereka yang berperan atau memberi dalam suatu tahapan investasi, pinjaman dan donasi, investasi, serta pihak pemerintah. PP No 71 Tahun 2010 mengatakan kualitas karakteristik suatu laporan keuangan pemerintah yaitu suatu prasyarat normatif yang sangat dibutuhkan sehingga laporan keuangan pemerintahan bisa memberikan kualitas yang diinginkan, yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dalam proses mengelola keuangan daerah yang ada dalam suatu instansi haruslah disusun dengan semaksimal mungkin agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif.

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, keuangan negara yaitu seluruh hak dan kewajiban suatu negara yang bisa diukur dengan uang, maupun segala sesuatu seperti alat yang bisa dijadikan milik Negara yang berkaitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Kualitas laporan keuangan pemerintah juga sangat dekat hubungannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Suatu pelaporan keuangan berkualitas harus dibuat oleh prinsip dan aturan yang terdapat di dalam standar akuntansi yang berlaku, sehingga suatu laporan keuangan pemerintah daerah haruslah mengacu pada SAP keuangan yang telah ditetapkan.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat erat kaitannya. Dengan adanya sistem informasi manajemen daerah dan penerapan SAP Daerah maka dalam pembuatan laporan keuangan serta penyajian laporan keuangan akan memiliki ketepatan waktu dalam memberikan penyajian laporan keuangan serta informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan dapat digunakan. Adapun tujuan dari implementasi SIMDA yaitu untuk memperoleh suatu laporan keuangan dan informasi keuangan dengan tepat waktu, komplit, akurat, dan dapat diandalkan serta sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan yang diterapkan seluruh lingkungan dipemerintahan pusat maupun pemerintahan di daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa unsur yaitu PP No 60 Tahun 2008: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008, bahwa proses seluruh aktifitas audit, pemantauan, evaluasi, revidi, dan aktifitas pengecekan yang pada melakukan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan rangka keyakinan yang memadai suatu kegiatan yang telah dilakukan sesuai pada tolak ukur dengan yang telah dilakukan secara efektif dan efisien dalam pemerintahan mewujudkan tata yang baik disebut dengan Pengawasan Internal.

Berdasarkan hasil temuan BPK atas LKPD TA 2017 yang daerah Kabupaten Seluma memperoleh laporan keuangan wajar dengan pengecualian. Dengan adanya temuan pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, yang lemah berkaitan dengan pertanggungjawaban penatausahaan belanja barang dan jasa lemahnya dalam proses tahapan yaitu pengelolaan bukti SPJ dan verifikasi, lemahnya pengendalian internal terkait Belanja Modal jembatan serta gedung dan bangunan jalan, lemahnya pengendalian internal terkait dengan penatausahaan aset tetap terutama keberadaan aset tetap tersebut, masih ada kekurangan kas pada pengeluaran bendahara dan ada penemuan berupa pembayaran proyek fisik melebihi progres fisiknya (www.bpk.go.id). Maka opini ini bisa diartikan bahwa pemerintah belum sepenuhnya menjalankan aset dan pengelolaan keuangan secara benar sesuai

aturan sebagai perwujudan dari komitmen untuk pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan dan transparan maka akan sangat berdampak pada keuangan laporan yang berkualitas dipemerintahan Kabupaten Seluma.

KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Donaldson dan Davis (1991) menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori tersebut menyatakan bahwa adanya suatu hubungan diantara kesuksesan organisasi dan kepuasan. Kesuksesan menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Dan filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu bisa berlaku jujur untuk pihak lainnya dan dapat dipercaya, serta memiliki integritas.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang berkualitas dapat dikatakan sangat baik, jika memberikan informasi laporan keuangan yang mudah untuk dapat dipahami, dan bisa memenuhi kebutuhan yang di perlukan pemakainya dalam mengambil suatu keputusan, bebas dari arti yang menyesatkan, kesalahan dalam material serta bisa untuk diandalkan, maka laporan keuangan ini bisa dibandingkan pada periode-periode terdahulu atau sebelumnya.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010, terkait SAP pada Pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan selanjutnya disebut SAP, yaitu suatu prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam membuat dan melakukan penyusunan dan laporan keuangan yang disajikan untuk pemerintah.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah

Menurut Anwar (2004:112) pengertian SIMDA merupakan Sistem Manajemen Informasi pemerintahan di daerah merupakan yang subsistemnya merupakan dari sistem informasi manajemen dari dalam negeri yang mendorong suatu informasi bagi penyelenggaraan kegunaan terutama dan penopang bagi pemerintahan di daerah yang terintegrasi yang baik.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

PP No 60 Tahun 2008 tentang SPIP menjelaskan bahwa proses yang sangat integral pada suatu tindakan dan kegiatan harus dilakukan secara terus-menerus oleh seorang pimpinan dan seluruh pegawai dalam memberikan suatu kepercayaan memadai atas tercapainya suatu tujuan dalam organisasi melalui pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, efektif dan efisien, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengembangan Hipotesis

Dalam laporan keuangan, pemerintah bertindak seperti steward dalam teori stewardship mempunyai kewajiban memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka akan bisa mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan keinginan prinsipal. Hasil penelitian yang mendukung pengaruh penerapan SAP terhadap laporan keuangan pemerintah yang berkualitas daerah yang mempengaruhi kualitas laporan Keuangan pemerintah yang

dilakukan oleh Purba (2017), Rahmawati dan Wati (2014) dengan hasil penerapan SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H₁: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam teori stewardship, bagi prinsipal dengan adanya SIMDA dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan SIMDA diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen untuk mencapai tujuan dan dapat menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan dapat menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik yang membutuhkan. Hasil penelitian yang menjadi pendukung tentang pengaruh implementasi teknologi informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yaitu menurut penelitian Alfian (2015) dan Alfiani (2017) implementasi sistem informasi manajemen daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂: Implementasi sistem informasi manajemen daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Teori stewardship dijelaskan bahwa sifat individu dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya, dapat dipercaya, serta memiliki integritas. Sistem pengendalian internal pemerintah dimana pemerintah bertanggung jawab memonitor aktivitas yang dilakukan dan akan menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, oleh karena itu pemerintah melakukan sistem pengendalian internal dengan cara melakukan mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan sehingga menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian yang mendukung mengenai SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yg dilakukan oleh Lumongga (2017), Rahmawati (2018) dan Putra (2017).

H₃: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif, tujuannya yaitu untuk menguji keandalan suatu teori yang mampu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Metode kuantitatif, sebagaimana dinyatakan (Sugiyono, 2010). adalah metode yang penelitiannya mengukur subjek penelitian dengan tepat. Teknik pengumpulan digunakan pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu teknik kuesioner. Skala yang digunakan dalam penyusunan kuesioner penelitian ini yaitu skala *likert*. Setiap pernyataan disediakan 5 (lima) alternatif jawaban, yaitu sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), ragu (R), setuju (S), dan sangat setuju (SS). Penelitian ini populasinya yaitu bagian pengelola keuangan OPD Kabupaten Seluma yang terdiri dari 26 OPD. Sedangkan pemilahan sampel di lakukan dengan *purposive sampling*. Kriteria sampel yang diambil yaitu kasubbag keuangan dan bidang perencanaan. Analisis dalam penelitian ini yang digunakan adalah:

Uji Kualitas Data

Uji validitas yang digunakan dalam mengukur baik atau tidaknya suatu kuisoner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji konsistensi data.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan menguji apakah di dalam model regresi variabel dependen dan independen, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Regresi yang baik itu seperti memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Jika melanggar asumsi maka model regresi dianggap tidak valid dengan jumlah sampel yang ada. Untuk menguji apakah distribusi data normal, maka dilakukan pengujian dengan cara analisis statistik yaitu uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

Pengujian multikolinearitas untuk melihat apakah variabel independen berhubungan dengan yang lain. (Ghozali, 2013). Variabel independen tidak mengalami multikolinearitas jika nilai VIF < 10. Untuk mengetahui masalah multikolinearitas dapat dilihat juga dari nilai *tolerance* yang merupakan kebalikan dari nilai VIF, yaitu 1/VIF. Uji heterokedastisitas yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan uji glejser.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini populasinya ini yaitu seluruh pegawai OPD Kabupaten Seluma yang melaksanakan pengelolaan keuangan yang termasuk kasubbag keuangan dan bidang perencanaan, dengan rincian:

Tabel 1
Distribusi Penyebaran Kuesioner

NO	NAMA OPD	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia	2	2
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	2
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	2
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2	2
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2	2
8	Dinas Sosial	2	2
9	Dinas Lingkungan Hidup	2	2
10	Dinas Kesehatan	2	2
11	Badan Penelitian dan Pengembangan	2	2
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2
13	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	2	2
14	Dinas Pertanian	2	2
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	2
16	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	2
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2	2
18	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2	2
19	Dinas Perikanan	2	2
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2	2
21	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	2	2
22	Inspektorat	2	2
23	Dinas Pendidikan	2	2
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	0
25	Dinas Ketahanan Pangan	2	0

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA

Tri Ikyarti dan Nila aprila

NO	NAMA OPD	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
26	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2	0
	TOTAL	52	46

Sumber: Data Primer Diolah 2019

Statistik Deskriptif

Hasil perolehan statistik deskriptif berdasarkan data yang telah dikumpulkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviation
		Min	Maks	Mean	Min	Maks	Mean	
Kualitas Laporan Keuangan	46	11	55	33	40	55	47,56	3,964
Standar Akuntansi Pemerintah	46	10	50	30	39	50	44,00	3,279
Sistem Informasi Manajemen Daerah	46	3	15	9	9	15	13,54	1,456
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	46	14	70	42	49	70	59,04	6,099

Uji validitas telah dilakukan pada instrumen penelitian. Hasil uji validitas terhadap variabel – variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Hasil Pengujian Validitas

No	Variabel	KMO MSA	Sig	Keterangan
1	Kualitas Laporan Keuangan	0,688	0,000	Valid
2	Standar Akuntansi Pemerintah	0,693	0,000	Valid
3	Sistem Informasi Manajemen Daerah	0,621	0,000	Valid
4	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,737	0,000	Valid

**) Lebih besar dari 0,05.

Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai *crnonbach alpha* > 0,7 (Ghozali, 2013). Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Uji Reliabilitas

No	Variabel	Jumlah Instrumen	Nilai Alpha Cronbach	Ket
1	Kualitas Laporan Keuangan	11	0,850	Reliabel
2	Standar Akuntansi Pemerintah	10	0,733	Reliabel
3	Sistem Informasi Manajemen Daerah	3	0,894	Reliabel
4	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	14	0,919	Reliabel

Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui normalitas distribusi data dapat dilihat dari *kolmogrov – smirnov test* dengan kriteria pengujian $> 0,05$ sebagai berikut :

Tabel 5
Hasil Pengujian Normalitas Data

Asymp Sig (2-tailed)	Keterangan
0,976	Normal

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanya korelasi antara variable terikat untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pada multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *tolrance* dan *varince invlantion factor* (VIF) dimana nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai $VIF < 10$, maka tidak akan terjadi multikolinearitas antar variabel independn (Ghozali, 2013).

Tabel 6
Hasil Pengujian Multikolinieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Standar Akuntansi Pemerintah	0,996	1,004	Bebas Multikolinieritas
2	Sistem Informasi Manajemen Daerah	0,913	1,095	
3	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,910	1,098	

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser dengan probabilitas signifikannya di atas ($>$) tingkat kepercayaan 5% atau 0,05 (Ghozali,2013). Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Data Penelitian

Variabel	Sig	Keterangan
Standar Akuntansi Pemerintah	0,816	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Informasi Manajemen Daerah	0,287	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,526	Bebas Heteroskedastisitas

Hasil Uji Hipotesis

Hasil output SPSS terhadap nilai F dan nilai R^2 disajikan dalam tabel 4.10 berikut ini :

Tahbel 8
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig.	Hasil
Standar Akuntansi Pemerintah	0,297	2,269	0,028	Diterima
Sistem Informasi Manajemen Daerah	0,405	2,958	0,005	Diterima
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,294	2,143	0,038	Diterima
<i>R Square</i>				0,282
<i>Adjusted R²</i>				0,231
F				5,501
Sig.				0,003

Pembahasan

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bukti bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik penerapan SAP, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden menjawab setuju untuk variabel standar akuntansi pemerintah dengan nilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 2,269 selain itu nilai koefisien adalah positif sebesar 0,297. Dengan begitu, hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian menyatakan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan simda terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi sistem informasi manajemen daerah, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden menjawab setuju untuk variabel sistem informasi manajemen daerah dengan nilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 2,958 selain itu nilai koefisien adalah positif sebesar 0,405.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa SPIP terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dengan statistik deskriptif juga menunjukkan rata-rata jawaban responden menjawab setuju untuk variabel SPIP dengan nilai cukup baik hal ini dibuktikan dengan nilai t-statistik sebesar 2,143 selain itu nilai koefisien adalah positif sebesar 0,294.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian untuk mengetahui apakah penerapan SAP, implementasi simda, dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten seluma. Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Implementasi sistem informasi manajemen daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah daerah terbukti berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Saran

Penelitian berikutnya diharapkan agar menambah variabel prediktor lain berdasarkan nilai *Adj. R-Square* dalam penelitian ini sebesar 23,1% yang artinya masih terdapat variabel independen lain seperti variabel sumber daya manusia yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan peneliti berikutnya diharapkan menambahkan metode lain selain menggunakan

kuesioner juga menggunakan metode wawancara atau interview agar dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel independen yaitu standar akuntansi pemerintah, sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey melalui kuesioner, peneliti tidak secara langsung melakukan wawancara di OPD Kabupaten Seluma sehingga kesimpulan yang diambil hanya mengungkap data dari hasil instrumen yang terkumpul.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M.K., (2004). *Aplikasi Sitem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan Di Era Otonomi Daerah*, SIMDA. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Alfian, M. (2015). Faktor Pendukung Implemetasi Simda Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Skpd Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ekonomi dan bisnis ISSN 1979 - 6471 (Volume XVIII No. 3, Dseember 2015)*.
- Alfiani, N. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemn Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Dukungan Manajemen Punck Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kabupaten Tegal). *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Donaldson, L., dan Davis, J.H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory, CEO Governance And Shareholder Returns, Australian. *Journal Of Management*, 16, 49-46
<http://.bpkp.go.id>. 2018, 28 09. Penyerahan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2017.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Semarang: BP Undip Gujarati.
- Lumongga. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Medan. *Skripsi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Medan*
- Purba, M.H. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruar, Kebijakan Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten deli Serdang. *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis .*
- Putra, D.K.A.D.S., Herawati, N.T., dan Sulindawati, N.G.L.E. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 8(2)
- Rahmawati, A., Mustika, I.W., dan Eka, L.H. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)*. 20 (2), 8-17.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bsnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA.
- Wati, K.D., Herawati, N.T., dan Sinarwati, N.K.(2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SELUMA

Tri Ikyarti dan Nila aprila

Keuangan Daerah. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 2 (1)

_____, Republik Indonesia 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

_____, Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

_____, Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

_____, Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah.